

COMPATIBILITY INOVASI SISTEM INFORMASI QUICK RESPONSE (SIQUPON) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN

Dyah Hariani¹ dan Ita Eliza Choirunnisak²

¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

²Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Diponegoro

e-mail: dyahhariani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan variabel Compatibility dalam Inovasi Sistem Informasi Quick Response (SIQUPON) Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan faktor yang mempengaruhinya. Dibandingkan dengan penelitian lain, penelitian ini berfokus pada satu variabel dan program yang masih baru sehingga perlu untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah kepala dinas perhubungan kota Pekalongan, staff dinas perhubungan kota pekalongan dan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan metode analisis Miles dan Huberman yang langkahnya terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Inovasi SIQUPON sudah disesuaikan dengan pengalaman, dimana adanya inovasi tidak serta merta membuang atau menghilangkan sistem sebelumnya (ATCS). SIQUPON juga telah disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku. Compatibility Inovasi SIQUPON di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan karena dapat mendukung percepatan penerimaan inovasi oleh calon pengguna (masyarakat). Adapun faktor yang mempengaruhi adalah adanya wadah evaluasi, kurangnya biaya untuk memenuhi kelengkapan dari Inovasi SIQUPON, belum adanya penghargaan atau insentif. Saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya anggaran khusus, pembaharuan struktur pengelola dan pembagian tugas yang jelas, penghargaan bagi pegawai yang memiliki inisiatif dan kreativitas yang tinggi, upaya promosi melalui pemanfaatan social media.

Kata Kunci: *Inovasi, Compatibility, Siqupon*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat (Undang-Undang tentang Pelayanan Publik 2009). Tujuan dari penyelenggaraan pelayanan prima adalah untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat dan publik. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik sudah seharusnya dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Masalah lalu lintas juga seringkali terjadi di Kota Pekalongan, terutama masalah kemacetan. Hal ini ditunjukkan melalui volume kendaraan di

Kota Pekalongan yang meningkat setiap tahunnya seperti pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Kendaraan di Kota Pekalongan Tahun 2014-2016

No	Jenis Kendaraan	2014	2015	2016	Jumlah
1	Mobil Penumpang	12.788	14.367	14.711	41.866
2	Mobil Bis	370	1.015	214	1.599
3	Mobil Barang	5.685	5.701	5.870	17.256
4	Sepeda Motor	152.057	154.229	162.033	468.319
	Jumlah	170.900	175.312	182.828	529.040

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Kota Pekalongan Tahun 2014-2016

Tabel 1. menginformasikan bahwa volume kendaraan di Kota Pekalongan dari

tahun 2014-2016 relatif meningkat dengan jumlah seluruh kendaraan mencapai 529.040 unit. Sepeda motor menduduki volume tertinggi diantara jenis kendaraan lainnya, yakni berjumlah 468.319 unit. Selanjutnya, diurutkan kedua ialah jenis mobil penumpang dengan jumlah 41.866 unit, kemudian diikuti oleh jenis mobil barang dengan jumlah 17.256 unit, serta yang paling kecil adalah angka mobil bis yang hanya berjumlah 1.599. Angka kendaraan dari tahun 2014-2015 mengalami peningkatan sebesar 2,6 %, dan tahun 2015-2016 sebesar 4,2 %. Tabel 1 juga dapat menginformasikan bahwa jumlah kendaraan tersebut belum termasuk kendaraan lain diluar kota Pekalongan yang melintasi jalur pantura(BPS n.d.). Tingginya volume kendaraan di Kota Pekalongan menjadi penyebab terjadinya kemacetan. Selain itu, karena banyaknya kendaraan yang melintasi jalur pantura di Kota Pekalongan seperti truk-truk bermuatan berat dan laju kendaraan yang tinggi juga dapat menimbulkan masalah lalu lintas lainnya. Peran dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dinas Perhubungan Kota Pekalongan merupakan suatu instansi yang berwenang untuk mengelola transportasi yang ada berikut permasalahan yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Berpedoman pada Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya memuat himbauan untuk melakukan inovasi, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan berupaya melaksanakan inovasi daerah melalui penerapan sistem baru sebagai upaya untuk memperbaiki sistem pengendalian lalu lintas sebelumnya. Inovasi yang diterapkan adalah Sistem Informasi Quick Response (SIQUPON).

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah mengenai Inovasi layanan

Samsat Walk Thru Sebagai Wujud Pelayanan Prima Di Kantor Bersama Samsat Mojokerto oleh Ellis Fedya dan Meirinawati pada tahun 2016 dalam jurnal ini peneliti menggunakan variable yang sama untuk meneliti tentang keberjalanan inovasi. Compatibility terkait pengambilan keputusan pihak Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto untuk membentuk inovasi layanan SAMSAT Walk Thru sudah berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat Mojokerto, yaitu pelayanan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit(Fedya 2008). Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Fitriana (2014) berjudul Inovasi Pelayanan Publik BUMN (Studi Deskriptif tentang Inovasi Boarding Pass System dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kereta Api PT KAI di Stasiun Gubeng Surabaya, menggunakan teori yang sama dengan penelitian ini. Hasilnya adalah inovasi boarding pass system meningkatkan kualitas pelayanan kereta api di Stasiun Gubeng Surabaya. Perbedaan dengan penelitian ini terletak penggunaan indicator yang berbeda, dan objek serta locus yang berbeda(Fitriana 2014). Penelitian selanjutnya “Inovasi Pelayanan Publik Pada Kantor SAMSAT Kota Tegal (Studi Kasus Pada Pajak Kendaraan Bermotor)” oleh Suwastiti, Endang Larasati, Sundarso, Titik Djumiarti (Sih Suwastiti, Gayuh. Larasati,Endang. Sundarso. Djumiarti 2016), mendapatkan hasil bahwa masih terdapat beberapa masalah terkait sumber daya manusia yang ada.

Penelitian ini memiliki persamaan dalam penggunaan variable compatibility dan topic yang dibahas terkait inovasi di SAMSAT kota Tegal. Perbedaannya terletak pada locus yang dipilih. Kemudian penelitian dari Robert & Goldspink (Kay and Goldspink 2016) dengan judul “Public Sector Innovation : Why it’s different ?” dan

penelitian Sihombing, T (Sihombing 2016) dengan judul “Public Service Innovation and Reform Towards Good Local Governance” peneliti menggunakan penelitian ini sebagai referensi dalam menganalisis bagaimana sebuah inovasi dalam sector public. Hasil dari kedua penelitian tersebut adalah inovasi public dan inovasi swasta merupakan sesuatu yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan milik peneliti terletak pada locus dan bahasan terkait penerapan inovasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan variabel Compatibility dalam Inovasi Sistem Informasi Quick Response (SIQUPON) Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan factor yang mempengaruhinya. Dibandingkan dengan penelitian lain, penelitian ini berfokus pada satu variable dan program yang masih baru sehingga penelitian sebelumnya dijadikan sebagai referensi dalam proses analisis.

KAJIAN PUSTAKA

Spicer Edward dalam Yogi Suwarno (Suwarno 2008, 67) mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan pelayanan yang diberikan oleh aparat penyelenggara publik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Lijan Poltak dalam bukunya Reformasi Pelayanan Publik (Sinambela 2008) mendefinisikan pelayanan publik sebagai rangkaian pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Dengan demikian, pelayanan publik dapat dipahami sebagai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat melalui bidang-bidang pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Pelayanan yang diberikan pemerintah meliputi pelayanan pendidikan, kesehatan, perhubungan, kependudukan dan

lain-lain sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian Yogi Suwarno (Suwarno 2008) mendefinisikan inovasi sebagai suatu proses menciptakan dan menawarkan produk atau jasa yang sifatnya baru dibandingkan dengan yang tersedia sebelumnya. Pandangan ini menjelaskan bahwa inovasi merupakan proses penemuan hal baru, cara baru, produk baru atau dapat berupa perbaikan dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Adapun inovasi bagi sektor publik merupakan tuntutan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi dan berbagai prinsip good governance bagi terciptanya kinerja pemerintah yang lebih baik.

Atribut Inovasi

Inovasi dalam pelaksanaannya memiliki atribut didalamnya. Menurut Rogers, Everett M (Rogers 1983) menyebutkan atribut inovasi antara lain meliputi:

Relative Advantage : suatu inovasi yang diterapkan harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Relative Advantage dapat diukur melalui nilai, biaya, kepuasan.

Compatibility: inovasi juga mempunyai sifat kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. **Compatibility** sebuah inovasi dapat diukur dari nilai, kebutuhan, dan pengalaman.

Complexity : Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.

Triability: inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya.

Observability : Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Compatibility

Menurut Rogers (1983:223), Kompatibilitas adalah sejauh mana inovasi dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Tingkat Compatibility dari sebuah inovasi juga mempengaruhi percepatan penerimaan masyarakat (calon user) terhadap produk inovasi yang ditawarkan oleh organisasi. Suatu inovasi dapat kompatibel atau tidak kompatibel dapat diukur dari :

Nilai-nilai atau kepercayaan sosio kultural

Nilai dipahami sebagai suatu hal yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Nilai erat kaitannya dengan sosio kultural yang ada di dalam masyarakat. Setiap masyarakat di suatu lingkungan sosial memiliki nilai-nilai tertentu sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan. Sebuah inovasi harus disesuaikan dengan nilai yang ada ada di dalam masyarakat. Kebijakan atau peraturan hukum merupakan salah satu nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi penerapan sebuah inovasi. Kecocokan Inovasi dengan kultur dan nilai yang menjadi pedoman bagi masyarakat dapat mempengaruhi cepat lambatnya penerimaan inovasi.

Pengalaman atau ide-ide yang diperkenalkan sebelumnya

Sesuatu yang pernah dialami seseorang merupakan pengalaman. Pengalaman dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk dapat menjalankan sesuatu yang lebih baik lagi. Sebuah inovasi harus disesuaikan dengan pengalaman. Kecocokan suatu inovasi dengan ide sebelumnya dapat mempercepat atau memperlambat laju adopsi. Gagasan lama adalah alat utama untuk menilai gagasan baru. Orang tidak bisa berurusan dengan inovasi kecuali atas dasar yang sudah dikenal sebelumnya. Sistem sebelumnya adalah standar sebuah

inovasi dapat ditafsirkan, sehingga mengurangi ketidakpastian.

Kebutuhan klien untuk inovasi.

Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya merupakan kebutuhan. Inovasi hadir sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah. Salah satu indikasi kompatibilitas suatu inovasi adalah derajat untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Agen perubahan berusaha menentukan kebutuhan masyarakat, dan kemudian merekomendasikan inovasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. akan tetapi, seringkali terhambat pada bagaimana merasakan kebutuhan yang dirasakan; agen perubahan harus memiliki tingkat empati dan hubungan yang erat dengan masyarakat untuk menilai kebutuhan mereka secara akurat. Penyelidikan informal dalam kontak interpersonal dengan individu, komite penasehat klien untuk agen perubahan, dan survei seringkali digunakan untuk menentukan kebutuhan inovasi. Tingkat kesesuaian dengan kebutuhan juga dapat mempengaruhi cepat lambatnya penerimaan masyarakat terhadap sebuah inovasi

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tingkat kompatibilitas sebuah inovasi dapat diukur melalui 3 aspek yang meliputi nilai, kebutuhan dan pengalaman, serta hasilnya dapat mempengaruhi cepat lambatnya penerimaan masyarakat terhadap produk inovasi yang ditawarkan oleh Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. metode penelitian ini merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Sugiyono 2009) dengan pendekatan deskriptif, yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Inovasi Sistem Informasi Quick Response (SIQUPON) Dinas Perhubungan Kota Pekalongan yakni kepala dinas perhubungan Kota Pekalongan, staff dinas perhubungan Kota Pekalongan, dan masyarakat. Sementara analisis data dilakukan dengan metode analisis Miles dan Huberman yang langkahnya terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (Sugiyono 2009) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Rogers dalam Yogi Suwarno (Suwarno 2008) sebuah inovasi harus mempunyai sifat kesesuaian dengan cara atau sistem yang sebelumnya digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama masih diterapkan, selain karena faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan pembelajaran inovasi itu secara lebih cepat. Bahkan, inovasi lama juga dapat dijadikan sebagai pendukung bagi inovasi yang baru. Tingkat Compatibility (Kesesuaian) dari sebuah inovasi dapat diukur melalui pengalaman, kebutuhan dan nilai.

Pengalaman

Pengalaman merupakan sesuatu hal yang pernah dialami seseorang. Pengalaman baik maupun buruk dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan evaluasi bagi kehidupan

yang lebih baik lagi. Dalam menetapkan suatu keputusan untuk melakukan sesuatu dibutuhkan pertimbangan dari pengalaman yang ada. Pengalaman menjadi pedoman seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan. Menurut Rogers (Rogers 1983, 224), penerapan sebuah inovasi juga harus disesuaikan dengan pengalaman sebelumnya agar lebih memudahkan diterima bagi calon pengguna. Hasil penelitian, inovasi SIQUPON telah disesuaikan dengan sistem sebelumnya, yaitu ATCS. Fungsi ATCS hanya sebatas untuk pengendalian melalui traffic light, sedangkan untuk tindaklanjut di lapangan masih dilakukan oleh masing-masing instansi dan belum terkoordinir dengan baik, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Inovasi SIQUPON hadir sebagai upaya untuk menyempurnakan sistem sebelumnya. Adanya Inovasi SIQUPON juga tidak serta merta membuang atau menghilangkan sistem yang sebelumnya ada (ATCS). ATCS diintegrasikan dengan SIQUPON sebagai komponen pendukung dalam mengatasi masalah lalu lintas di Kota Pekalongan. Misalnya, ketika ada laporan masuk maka ada 2 cara yang dapat digunakan. Apabila masalah yang dilaporkan masih beresiko kecil maka dapat dilakukan pengaturan ATCS. Akan tetapi, apabila masalah yang dilaporkan memiliki resiko yang cukup besar maka dilakukan tindaklanjut di lapangan melalui koordinasi dengan instansi yang ikut berwenang mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, Inovasi SIQUPON telah disesuaikan dengan pengalaman yang dibuktikan dengan mengintegrasikan ATCS dengan SIQUPON untuk mengatasi masalah lalu lintas di Kota Pekalongan.

Faktor pendukung Compatibility Inovasi SIQUPON terhadap pengalaman adalah adanya kebebasan berpendapat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan

bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekalongan memiliki keterbukaan dalam menerima pendapat melalui adanya wadah evaluasi. Adanya Inovasi SIQUPON juga merupakan hasil evaluasi dari kekurangan sistem sebelumnya (ATCS), sehingga dibutuhkan penyesuaian sistem yang lebih baik. Selain itu, masalah kurangnya partisipasi pengguna SIQUPON juga dibahas dalam rapat evaluasi bersama BPPT yang kemudian menghasilkan keputusan pembaharuan sistem dari basis web ke basis android. Akan tetapi, ketergantungan terhadap figure tertentu menjadi penghambat Compatibility Inovasi SIQUPON terhadap pengalaman. Hal ini dibuktikan dari pelaksanaan tindaklanjut SIQUPON masih kurang terintegrasi dengan baik, karena kurangnya inisiatif pegawai. Beberapa pegawai cenderung hanya menunggu konfirmasi dari manajer dalam pengambilan keputusan tindaklanjut terhadap laporan yang masuk melalui SIQUPON.

Kebutuhan

Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk melangsungkan kehidupannya adalah kebutuhan. Kebutuhan manusia akan semakin bertambah seiring kemajuan zaman. Pemerintah melalui pelayanan public dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Inovasi yang diterapkan suatu organisasi juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan organisasi itu sendiri. Rogers (Rogers 1983, 225). Tingkat kesesuaian sebuah inovasi dengan kebutuhan juga berpengaruh terhadap percepatan penerimaan pengguna terhadap produk inovasi yang ditawarkan. Hasil penelitian, inovasi SIQUPON telah disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengatasi permasalahan lalu lintas di Kota Pekalongan. SIQUPON merupakan produk dari BPPT RI yang diterapkan Dinas

Perhubungan Kota Pekalongan untuk mengatasi masalah lalu lintas secara lebih terpusat pada satu sistem terpadu. SIQUPON hadir dilatarbelakangi oleh permasalahan lalu lintas di Kota Pekalongan seperti kemacetan, kecelakaan dan keributan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, Kota Pekalongan juga merupakan salah satu kota yang dilalui oleh jalur pantura dengan kompleksitas permasalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lainnya. Tujuan adanya Inovasi SIQUPON adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pemerintah dalam menghadapi masalah lalu lintas di Kota Pekalongan. Konsep dari SIQUPON adalah wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan masalah lalu lintas ke call center yang tersedia untuk kemudian ditindaklanjuti dengan instansi terkait yang berwenang mengatasi masalah tersebut. Adanya SIQUPON juga memberikan kemudahan bagi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan instansi terkait untuk melakukan koordinasi terkait tindaklanjut dari masalah lalu lintas yang dilaporkan secara lebih efektif dan efisien.

Faktor pendukung Compatibility terhadap kebutuhan adalah adanya pihak-pihak yang ikut berperan dalam mendukung terlaksanakannya Inovasi SIQUPON, yakni BPPT. BPPT merupakan pihak yang sangat berperan untuk mendukung terlaksananya Inovasi SIQUPON yang antara lain meliputi; Pemberian Bimbingan Teknologi (BINTEK) SIQUPON kepada operator, memberikan sarana dan prasarana utama SIQUPON kepada pihak internal maupun eksternal terkait yang antara lain meliputi; software aplikasi, running text, serta alarm SIQUPON. BPPT juga melakukan evaluasi kepada Dinas Perhubungan Kota Pekalongan untuk mengetahui pemasalahan

dan kendala yang dihadapi dalam penerapan SIQUPON sepertihalnya masih rendahnya partisipasi pengguna. Hal ini juga didukung oleh adanya kesesuaian dengan sistem sebelumnya (ATCS) dengan tidak menghilangkan melainkan malah mengintegrasikan ke dalam Inovasi SIQUPON. Akan tetapi, untuk melengkapi kebutuhan lainnya adalah kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Pekalongan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya merupakan faktor penghambat dalam upaya meningkatkan kompatibilitas inovasi SIQUPON pemenuhan kebutuhan; pemeliharaan, pengadaan maupun pengembangan SIQUPON masih belum mencukupi. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan belum memiliki anggaran khusus untuk mengelola Inovasi SIQUPON. Anggaran yang digunakan masih menginduk dengan dana ATCS, dan belum ada pembagian yang jelas. Hal ini menyebabkan kegiatan promosi melalui event atau pameran, perlombaan, sosialisasi maupun bentuk promosi lainnya menjadi terhambat. Dengan demikian, hal ini berpengaruh terhadap lambatnya penerimaan informasi tentang SIQUPON oleh masyarakat.

Nilai

Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk dan pantas atau tidak pantas oleh masyarakat. Nilai dan kebudayaan berkaitan satu sama lain. Setiap masyarakat di suatu lingkungan sosial memiliki nilai-nilai tertentu sebagai dasar atau pedoman untuk menjalankan kehidupan. Menurut Rogers (Rogers 1983, 223), inovasi yang tidak disesuaikan dengan nilai atau norma yang ada didalam masyarakat, tidak akan cepat diterima seperti inovasi yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Salah satu sumber nilai yang menjadi pedoman bagi masyarakat

dalam bertindak laku adalah adanya kebijakan atau peraturan hukum. Hasil penelitian, pelaksanaan Inovasi Sistem Informasi Quick Response (SIQUPON) sudah mengacu pada peraturan dan kebijakan yang sudah diputuskan sebelumnya. Inovasi SIQUPON di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan mengacu pada Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnya memuat pelaksanaan inovasi daerah. SIQUPON hadir sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan inovasi di daerah untuk mengatasi permasalahan lalu lintas melalui pemanfaatan teknologi. Inovasi Sistem Informasi Quick Response (SIQUPON) di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan juga berpedoman terhadap Perda Kota Pekalongan No 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang didalamnya berisi tentang sistem informasi dan komunikasi. SIQUPON merupakan salah satu upaya untuk menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi karena berfungsi sebagai pusat informasi dan koordinasi tentang masalah lalu lintas di Kota Pekalongan.

Faktor pendukung Compatibility Inovasi SIQUPON adalah adanya keinginan untuk berubah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekalongan memiliki sikap keinginan untuk berubah yang menjadi salah satu faktor pendukung inovasi yang meliputi; kemauan untuk menerapkan SIQUPON sebagai upaya memperbaiki sistem yang sebelumnya (ATCS) dengan memberikan sistem yang terpadu sebagai pusat koordinasi dan informasi masalah lalu lintas; serta adanya penyusunan rencana pengembangan aplikasi SIQUPON dari basis web menjadi android. Inovasi SIQUPON terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin

modern melalui pembaharuan aplikasi berbasis web menjadi berbasis android yang dapat diunduh di playstore. Hal ini memberikan dukungan dalam mencapai kompatibilitas untuk mewujudkan nilai keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di Kota Pekalongan dari adanya SIQUPON sebagai sebuah inovasi di Kota Pekalongan. Akan tetapi, kendala yang ditemui adalah belum adanya penghargaan atau insentif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa belum adanya penghargaan dan pemberian insentif kepada para pegawai yang bertanggung jawab sebagai pengelola SIQUPON menjadi penyebab kurangnya motivasi pegawai. Para pegawai cenderung hanya melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan saja, sedangkan inisiatif yang berupa ide atau gagasan masih kurang. Hal ini juga berpengaruh terhadap compatibility pada Inovasi SIQUPON dalam mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam pedoman yang telah ditetapkan

PENUTUP

Kesimpulan

Inovasi SIQUPON sudah disesuaikan dengan pengalaman, dimana adanya inovasi tidak serta merta membuang atau menghilangkan sistem sebelumnya (ATCS). Faktor pendukungnya adalah adanya wadah evaluasi untuk mengemukakan pendapat dan faktor penghambatnya adalah ketergantungan terhadap figure tertentu. Adanya Inovasi SIQUPON juga telah disesuaikan dengan kebutuhan terhadap sistem informasi dan koordinasi untuk mengatasi masalah lalu lintas di Kota Pekalongan yang didukung BPPT sebagai pihak berperan penting dalam penerapan SIQUPON di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, namun kendala yang ditemui adalah masih kurangnya biaya untuk

memenuhi kelengkapan dari Inovasi SIQUPON. SIQUPON juga telah disesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dan Perda Kota Pekalongan No. 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang didukung oleh adanya keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi dalam mencapai tujuan Inovasi SIQUPON, namun kendala yang ditemui adalah belum adanya penghargaan atau insentif yang berdampak pada kurangnya motivasi pegawai untuk mencapai tujuan Inovasi SIQUPON. Dengan demikian, Compatibility Inovasi SIQUPON di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan karena dapat mendukung percepatan penerimaan inovasi oleh calon pengguna (masyarakat).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Diperlukan anggaran khusus melalui rancangan skala prioritas dari kebutuhan Inovasi SIQUPON yang melibatkan pihak-pihak berperan terhadap pemberian anggaran.

Diperlukan pembaharuan struktur pengelola dan pembagian tugas yang jelas agar lebih meningkatkan rasa tanggung jawab diantara pegawai, yang antara lain meliputi bidang : administrasi, sosialisasi, operator dan auditor

Diberikan penghargaan bagi pegawai yang memiliki inisiatif dan kreativitas yang tinggi dalam bentuk materiil maupun immateriil melalui pembaharuan peran kepemimpinan yang sesuai dengan kultur organisasi.

Ditingkatkan upaya promosi melalui pemanfaatan social media untuk membranding masyarakat tentang pentingnya mematuhi ketertiban lalu lintas

dan adanya SIQUPON sebagai wadah untuk melaporkan masalah lalu lintas di Kota Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. "Jumlah Kendaraan Di Kota Pekalongan Tahun 2014 - 2016." <https://pekalongan.kota.bps.go.id/> (March 6, 2019).

Fedya, Ellis. Meirinawati. 2008. "Inovasi Drive Thru Mojokerto." 1204067407: 1–10.

Fitriana, Diah Nur. 2014. "Inovasi Pelayanan Publik BUMN (Studi Deskriptif Tentang Inovasi Boarding Pass System Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kereta Api PT KAI Di Stasiun Gubeng Surabaya) Diah Nur Fitriana." *Kebijakan dan Manajemen Publik* 2(1): 1–10.

Kay, Robert, and Chris Goldspink. 2016. "Public Sector Innovation : Why It ' s Different." *Governance Leadership Centre*: 1–13. http://www.companydirectors.com.au/~/_media/resources/director-resource-centre/glc/05493-1-pol-glc-public-sector-innovation-research-paper-a4-may16_web.ashx?la=en.

Rogers, Everett M. 1983. *Diffusion of Innovations*. 10th ed. London: Library of Congress Cataloging in Publication Data. <https://teddykw2.files.wordpress.com/2012/07/everett-m-rogers-diffusion-of-innovations.pdf>.

Sih Suwastiti, Gayuh. Larasati, Endang. Sundarso. Djumiarti, Titik. 2016. "Inovasi Pelayanan Publik Pada Kantor Samsat Kota Tegal (Studi Kasus Pada Pajak Kendaraan Bermotor)." *Journal Of Public Policy And Management* 5: 2–9. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/11990/11644>

Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suwarno, Yogi. 2008. "Inovasi Di Sektor Publik." *Jurnal Administrasi Publik* 5(2).

Undang-Undang 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.